



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2018 - 2022**



**KANTOR KECAMATAN TITEHENA
JL. WAIRUNU-LATO**

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih atas Penyelenggaraan Sang Guru Ilahi dan berkat dukungan Leluhur Lewotana Titehena "Koten, Kelen, Hurit, Maran" menghadirkan seorang Pemimpin Lewotana Lamaholot dengan membawa visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022.

Kecamatan Titehena terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menindaklanjuti dalam bentuk Rencana Strategi Pemerintah Kecamatan Titehena Tahun 2017 – 2022. Tindak lanjut Rencana Strategi menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Titehena.

Patut disadari bahwa dalam penyusunan ini masih mengalami banyak keterbatasan dan kekurangan; untuk itu usul saran yang konstruktif demi perbaikan sungguh dan sangat kami harapkan. Tentunya hari ini kita memulai, apa yang diketahui dan sungguh berharga jika kita saling melengkapi.

Akhirnya segala ungkapan hati melalui usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini menjadi pedoman untuk kerja dan bekerja bersama-sama membangun Titehena.

Kiranya Sang Raja memberkati setiap usaha dan karya kita.

Lolo, 17 Januari 2018
Camat Titehena,

Kornelis Kowa Deket, S.S.os
Pembina
NIP 19700220 200012 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih atas Penyelenggaraan Sang Guru Ilahi dan berkat dukungan Leluhur Lewotana Titehena "Koten, Kelen, Hurit, Maran" menghadirkan seorang Pemimpin Lewotana Lamaholot dengan membawa visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022.

Kecamatan Titehena terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menindaklanjuti dalam bentuk Rencana Strategi Pemerintah Kecamatan Titehena Tahun 2017 – 2022. Tindak lanjut Rencana Strategi menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Titehena.

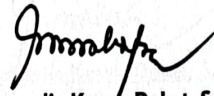
Patut disadari bahwa dalam penyusunan ini masih mengalami banyak keterbatasan dan kekurangan; untuk itu usul saran yang konstruktif demi perbaikan sungguh dan sangat kami harapkan. Tentunya hari ini kita memulai, apa yang diketahui dan sungguh berharga jika kita saling melengkapi.

Akhirnya segala ungkapan hati melalui usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini menjadi pedoman untuk kerja dan bekerja bersama-sama membangun Titehena.

Kiranya Sang Raja memberkati setiap usaha dan karya kita.

Lato, 17 Januari 2018

✓ Camat Titehena,



Kornelis Kowa Deket, S.S.os

Pembina

NIP 19700220 200012 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih atas Penyelenggaraan Sang Guru Ilahi dan berkat dukungan Leluhur Lewotana Titehena "Koten, Kelen, Hurit, Maran" menghadirkan seorang Pemimpin Lewotana Lamaholot dengan membawa visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022.

Kecamatan Titehena terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menindaklanjuti dalam bentuk Rencana Strategi Pemerintah Kecamatan Titehena Tahun 2017 – 2022. Tindak lanjut Rencana Strategi menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Titehena.

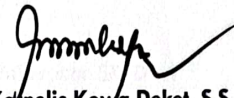
Patut disadari bahwa dalam penyusunan ini masih mengalami banyak keterbatasan dan kekurangan; untuk itu usul saran yang konstruktif demi perbaikan sungguh dan sangat kami harapkan. Tentunya hari ini kita memulai, apa yang diketahui dan sungguh berharga jika kita saling melengkapi.

Akhirnya segala ungkapan hati melalui usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini menjadi pedoman untuk kerja dan bekerja bersama-sama membangun Titehena.

Kiranya Sang Raja memberkati setiap usaha dan karya kita.

Lato, 17 Januari 2018

Camat Titehena,



Karelis Kowa Deket, S.S.os

Pembina

NIP 19700220 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR/TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN UMUM	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD	9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKP	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	23
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Titehena	27
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD	29

5.2. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	31
BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	32
BAB VIII. PENUTUP	33

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR/TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN UMUM	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD	9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKP	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	23
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Titehena	27
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD	29

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR/TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN UMUM	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD	9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKP	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	23
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Titehena	27
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD	29
5.2. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	31
BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	32
BAB VIII. PENUTUP	33

5.2. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	31
BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	32
BAB VIII. PENUTUP	33

DAFTAR GAMBAR /TABEL

Gambar 1.1	: Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Titehena Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Kecamatan	5
Tabel 2.2.1	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Jabatan	10
Tabel 2.2.2	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang	10
Tabel 2.2.3	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 2.2.4	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Diklat Penjenjangan	11
Tabel 2.2.5	: Kondisi Asset/Modal Kecamatan Titehena	13
Tabel 2.3.1	: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Titehena	14
Tabel 2.3.2	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Titehena tahun 2017s/d 2022	15
Tabel 3.1.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Titehena	19
Tabel 3.1.2	: Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	21
Tabel 3.2.1	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
Tabel 3.3.1	: Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	23
Tabel 3.4.1	: Analisis Lingkungan Internal dan eksternal	24
Tabel 4.2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat	28
Tabel 5.1.	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	30
Tabel 6.1	: Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	45
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

DAFTAR GAMBAR /TABEL

Gambar 1.1	: Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Titehena Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Kecamatan	5
Tabel 2.2.1	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Jabatan	10
Tabel 2.2.2	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang	10
Tabel 2.2.3	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 2.2.4	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Diklat Penjenjangan	11
Tabel 2.2.5	: Kondisi Asset/Modal Kecamatan Titehena	13
Tabel 2.3.1	: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Titehena	14
Tabel 2.3.2	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Titehena tahun 2017s/d 2022	15
Tabel 3.1.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Titehena	19
Tabel 3.1.2	: Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	21
Tabel 3.2.1	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
Tabel 3.3.1	: Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	23
Tabel 3.4.1	: Analisis Lingkungan Internal dan eksternal	24
Tabel 4.2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat	28
Tabel 5.1.	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	30
Tabel 6.1	: Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	45
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

DAFTAR GAMBAR /TABEL

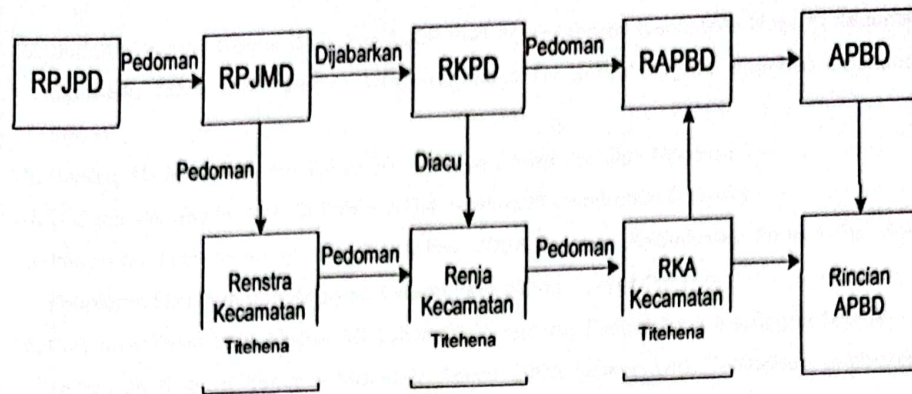
Gambar 1.1	: Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Titehena Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Kecamatan	5
Tabel 2.2.1	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Jabatan	10
Tabel 2.2.2	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang	10
Tabel 2.2.3	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 2.2.4	: Jumlah PNS Kecamatan Titehena berdasarkan Diklat Penjenjangan	11
Tabel 2.2.5	: Kondisi Asset/Modal Kecamatan Titehena	13
Tabel 2.3.1	: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Titehena	14
Tabel 2.3.2	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Titehena tahun 2017s/d 2022	15
Tabel 3.1.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Titehena	19
Tabel 3.1.2	: Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	21
Tabel 3.2.1	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
Tabel 3.3.1	: Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	23
Tabel 3.4.1	: Analisis Lingkungan Internal dan eksternal	24
Tabel 4.2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat	28
Tabel 5.1.	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	30
Tabel 6.1	: Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	45
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekaligus dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja SKPD terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu Kantor Camat Titehena sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan 2017 – 2021 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 (PERDA Nomor 10 Tahun 2017). Maka dari itu sangat diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan baik dibidang perencanaan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Kantor Camat Titehena merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan .



Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Titehena Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Titehena adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protekoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019);
23. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Dareah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Titehen adalah :
 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Kecamatan Titehena selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.
- Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Titehena adalah :
 1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para camat;
 2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
 3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Titehena yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan

- yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Titehena adalah sebagai berikut:

Bab I:

Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab II:

Gambaran Pelayanan SKPD; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab III:

Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun berjalan.

Bab IV:

Tujuan dan Sasaran dari Rencana Strategis Kantor Camat Titehena untuk lima tahun kedepan sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur (2017-2022)

Bab V:

Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan memuat Visi dan Misi lembaga, perumusan sasaran/target serta keterkaitan Misi, Kebijakan dan Strategi implementasinya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Titehena.

Bab VI:

memuat rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII:

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN TITEHENA

1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Titehena

Secara administrasi wilayah keseluruhan : 211,70 Km², Kecamatan Titehena terdiri dari 14 Desa Defenitif dengan jumlah penduduk keseluruhan L: 6088 Jiwa, P: 6043 Jiwa Jumlah L+P= 12.134 Jiwa, memiliki wilayah administrasi sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jmlh Dusun	Jmlh RW	Jmlh RT	Luas
1	Adabang	5	5	10	3,02 km ²
2	Watowara	7	9	20	29,63 km ²
3	Serinuho	3	6	12	7,80 km ²
4	Duntana Lewoingu	3	3	6	10,74 km ²
5	Tenawahang	5	8	16	40,01 km ²
6	Ile Gerong	3	6	12	1,60 km ²
7	Kobasoma	3	4	8	59,21 km ²
8	Konga	3	3	9	25,00 km ²
9	Lewolaga	4	8	16	4,45 km ²
10	Lewoingu	4	4	13	10,00 km ²
11	Tuakepa	5	4	12	3,07 km ²
12	Leraboleng	3	6	12	11,86 km ²
13	Duli Jaya	2	2	5	4,13 km ²
14	Bokang Wolomatang	2	2	4	1,25 km ²
JUMLAH		52	70	155	211,70 km ²

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, maka struktur Kantor Camat Titehena sebagai berikut:

1. Fungsi Camat :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
 - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kasi Pemerintahan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..
8. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Fungsi Kasi Perekonomian :
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. Fungsi SKPD Kecamatan Titehena
- Fungsi SKPD kecamatan Titehena adalah sebagai berikut :
- 1. Fungsi koordinasi. SKPD Titehena melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas baik yang berada di Kecamatan maupun di Kabupaten.
 - 2. Fungsi fasilitasi. Memfasilitasi segala kegiatan yang ada di kecamatan yang dilaksanakan instansi/dinas, UPT maupun pihak swasta

2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Titehena

- a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 :
Jumlah PNS Kantor Camat Titehena berdasarkan Jabatan Tahun 2017

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1	Camat	IV.a	1 Orang
2	Sekretaris Camat	III.b	1 Orang
3	Kepala Seksi	IV.b	4 Orang
4	Kasubag	IV.b	2 Orang
JUMLAH			8 Orang

Sumber : Kantor Camat Titehena Tahun 2017.

Tabel 2.2.2 :
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	-
2.	Pembina	IV/a	3 Orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	3 Orang
4.	Penata	III/c	2 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 Orang
6.	Penata Muda	III/a	1 Orang
7.	Pengatur Tk. I	II/d	2 orang
8.	Pengatur	II/c	4 Orang
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang
10.	Pengatur Muda	II/a	2 Orang
11.	Juru Tingkat I	I/d	-
12.	Juru	I/c	1 Orang
13.	Juru Muda Tk. I	I/b	-
14.	Juru Muda	I/a	1 Orang
JUMLAH			21 Orang

Sumber : Kantor Camat Titehena Tahun 2017.

Tabel 2.2.3 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	
2.	Sarjana (S-1)	4 Orang
3.	Diploma III / Akademi / Ahli Madya	2 Orang
4.	Diploma I / Diploma II	-
5.	SLTA	12 Orang
6.	SLTP	2 Orang
7.	SD	1 Orang
JUMLAH		21 Orang

Sumber : Kantor Camat Titehena Tahun 2017.

Tabel 2.2.4 :
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1 Orang
JUMLAH		1 Orang

Sumber : Kantor Camat Titehena Tahun 2017.

Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Nama / Tempat Tanggal Lahir/ NIP	Pangkat/Gol Ruang TMT	Pendidikan Terakhir	Jabatan	TMT	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kornelis Kowa Deket, S.Sos Watoone, 20-02-1970 NIP. 19700220 200012 1 004	Pembina /IV/a 01-10-2015	S1 (Ilmu Sosial Adm. Negara)	Camat	20-01- 2017	
2.	Martinus Lawe Wada Flores Timur, 24-11- 1959 NIP. 195911241985031009	Pembina /IV/a 01-10-2014	D3 Pendidikan Luar Sekolah	Sekretaris Kecamatan	20-01- 2017	

3.	Drs. Tomas Laga Waidang, 06-11- 1966 NIP. 19661106 199903 1 005	Pembina /IV/a 01-04-2013	S1 Ilmu Adm. Negara	Fungsional Umum		
4.	Yanuaris Nggorong, S.Ag Raenyale, 10 Oktober 1973 NIP. 19731004 200012 1 004	Penata Tk. I/III.d 01-10-2011	S1 Filsafat Agama Katolik	Kasie Pemerintahan	20-01- 2017	
5.	Caecilia A.Soebanpoelo, SE Larantuka, 27 April 1981 NIP. 19810427 200604 2 015	Penata Tk.I/ III.d 01-04-2017	S1 / Ekonomi Manajemen	Kasie PMD	20-01- 2017	
6.	Marianus Dominggus Wuring Pantai Besar, 28 April 1963 NIP. 19630428 198811 1 001	Penata Tk. I/III.d 01-04-2017	SMA/ IPS	Kasie Ekonomi	20-01- 2017	
7.	Kebaku Koten Petrus Lewolaga, 01 Agustus 1963 NIP. 19630801 199003 1 008	Penata / III.c 01-10-2015	SMEA/ Tata Buku	Kasie Pelum & Kessos	20-01- 2017	
8.	Yoseph Beda Doren Lewoleba, 07 Juli 1964 NIP. 19640707 199203 1 013	Penata / III.c 01-04-2016	SMA/ Biologi	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	20-01- 2017	
9.	Sesilia Niga Mamun, A.Md Nisakarang, 27 November 1981 NIP. 19811127 200604 2 019	Penata Muda Tk.I/III.b 01-04-2016	D3 Bahasa Inggris	Kasubag Umum, Keuangan Dan Kepegawaian	20-01- 2017	
10.	Leonardus Nama Hayong Flores Timur, 10 Januari 1960 NIP. 19600110 198603 1 020	Penata Muda/III.a 01-04-2014	SMA Persamaan	Kasubag Program, Data dan Evaluasi	20-01- 2017	
11.	Kornelis Ola Keda Mangaaleng, 09 -10-1974 NIP. 19741009 200212 1 008	Pengatur /II.d 01-04-2015	SMEA/ Akuntansi	Fungsional Umum		
12.	Antonius Ama Koten Duli, 10 Juli 1976 NIP. 19760710 200112 1 002	Pengatur Tk.I/II.d 01-04-2014	SPP/Penangka pan Ikan	Fungsional Umum		
13.	Kamilus Polly Oeklu, 31 Desember 1966	Pengatur /II.c 01-04-2014	SMA/	Fungsional Umum		

	NIP. 19661231 200604 1 229					
14.	Angelus Gekeng Senarang, 10-11-1966 NIP.19661110 200701 1 029	Pengatur /Il.c 01-04-2015	SMA	Fungsional Umum		
15.	Gabriel Suban Wato, Pukaunu, 15 Februari 1966 NIP. 19660215 200701 1 028	Pengatur /Il.c 01-04-2015	SMA	Fungsional Umum		
16.	Damasus Likuwatan Kuman Flores Timur, 11-12-1963 NIP. 19631211 200701 1 028	Pengatur /Il.c 01-04-2015	SMA	Fungsional Umum		
17.	Yoakim Subang Eputobi, 16 Agustus 1971 NIP. 19710816 200906 1 002	Pengatur Muda Tk.I /Il.b 01-04-2014	SMA	Fungsional Umum		
18.	Rofinus A. Gena Teluma Flores Timur, 19-06-1973 NIP. 19730619 201001 1 002	Pengatur Muda/Il.a 01-04-2014	SMA	Fungsional Umum		
19.	Tobias Tobi Kumanireng Gerong, 10-12-1960 Nip. 196012102007011005	Pengatur Muda/Il.a 01-10-2015	SMP	Fungsional Umum		
20.	Melkior Belawa Kumanireng Leworok, 18-05-1967 Nip. 19670518 200701 1 036	Juru/l. 01-04-2016	SD	Fungsional Umum		
21.	Vincentius More Ende, 25 September 1984 NIP. 19840925 201212 1 004	Juru Muda /l.a 01-12-2012	SD	Fungsional Umum		

b. Aset

Tabel 2.2.5
Aset/Modal Kantor Camat Titehena

No.	Uraian Aset	Nilai
1.	Tanah	Rp. 130.086.000
2.	Peralatan Dan Mesin	Rp. 203.610.000
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 399.600.000

4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 26.000.000
5.	Aset Tetap Lainnya	-
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-
7.	Akumulasi Penyusutan	-
	Jumlah Aset Tetap/Modal	Rp. 759.296.000

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Titehena

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Titehena terus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan.
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja.
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan.
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Titehena Tahun 2012 - 2016

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	70 %	100 %	87,5 %	100 %	99 %	70 %	100 %	87,5 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	77 %	50 %	53%	100 %	100 %	77 %	50 %	53 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	97%	97%	97 %	97%	98 %	90 %	95 %	98 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %
5	Prosentase terselenggaranya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %

	pelayanan administrasi kepada masyarakat																
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90%	90%	90%	90%	100 %	90%	90%	90%	90%	
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	98 %	98 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kantor Camat Titehena

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.007.728.849,00	1.011.475.226,00	1.028.642.440,00	1.189.682.569,98	1.258.489.112,12	1.007.659.271,00	1.008.229.870,00	1.017.275.573,00	1.172.914.014,00	1.231.414.111,00	99,99	99,68	98,85	98,60	96,42	98,54%	98,54%
Belanja Langsung	295.312.000,00	398.568.000,00	450.157.000,00	623.400.000,00	629.331.000,00	295.281.300,00	398.483.500,00	442.585.500,00	622.934.000,00	616.379.500,00	99,99	99,98	99,32	99,93	97,94	99,60%	99,60%
Belanja Pegawai	21.525.000,00	22.550.000,00	30.750.000,00	57.550.000,00	68.800.000,00	21.525.000,00	22.550.000,00	23.750.000,00	57.548.000,00	68.792.000,00	100,00	100,00	77,23	99,99	99,99	99,67%	99,67%
Belanja Barang dan Jasa	253.887.000,00	366.018.000,00	405.007.000,00	504.450.000,00	463.681.000,00	253.856.300,00	365.933.500,00	404.435.500,00	503.986.000,00	456.977.500,00	99,98	99,97	99,86	99,90	98,55	99,60%	99,60%
Belanja Modal	19.900.000,00	10.000.000,00	14.400.000,00	61.400.000,00	96.850.000,00	19.900.000,00	10.000.000,00	14.400.000,00	61.400.000,00	90.610.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,55	99	99,35 %
Jumlah Belanja	1.303.040.849,00	1.410.043.226,00	1.478.799.440,00	1.588.782.129,66	1.813.082.569,98	1.302.940.571,00	1.406.713.370,00	1.459.861.073,00	1.795.848.014,00	1.847.793.611,00	99,82	99,20	99,65	97,26	99,22	99,03 %	99,03 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Titehena

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Pelayanan administrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
9. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
10. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
11. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
12. Income perkapita masyarakat masih rendah;
13. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
14. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;

6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi "agak mandul". Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi "agak mandul". Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Titehena, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya,

antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Titehena

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung ,SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang

					belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang menyetuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
Kapasitas SDM aparatur masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparat yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	kketersediaan dan perhatian para aparat medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergantungan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara peminat dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

3.2. Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

1. Flores Timur Sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. *Selamatkan Orang Muda Flores Timur* dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. *Selamatkan Infrastruktur Flores Timur* dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. *Selamatkan Tanaman Rakyat* dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. *Selamatkan Laut Flores Timur* dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. *Reformasi Birokrasi* dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Titehena berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: " Flores Timur Sejahtera dalam Bingaki Desa Membangun Kota Menata "				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Misi 5 : Reformasi Birokrasi			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efetiifitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan	Keterbatas dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meingkatkan kinerja

		publik		pelayanan publik
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	5. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	Kurang maksimalnya kelembagaan PKK dan pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta kurangnya pengawasan	Adanya dukungan dana yang disediakan demi terselenggaranya kegiatan PKK

3.3. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengendalian dan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah dalam Pembangunan Perwilayahan di Kecamatan.	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang wilayah dalam pembangunan perwilayahan di kecamatan.	- Belum ada rencana Detil tata ruang kota. - Kurangnya dukungan Masyarakat dalam pemanfaatan Tata Ruang. - Dokumen perencanaan belum optimal memperhatikan dokumen Tata Ruang	- Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang.
2.	Pengembangan Pertanian (tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan)	Koordinasi dan pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan	Belum memiliki aparatur UPTD yang memadai	Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
3	Pembangunan Perternakan	Koordinasi , pembinaan dan pengawasan tidak berjalan baik	Belum memiliki aparatur UPTD yang memadai	Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
4	Pengembangan industri Kecil/Home Industry Pengelolaan Hasil Pertanian, Kerajinan Rakyat	Pembinaan dan Pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik	Keterbatasan aparatur	Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
5	Pengembangan pariwisata alam	Pembinaan dan pengawasan tidak	Keterbatasan aparatur	Adanya pelimpahan kewenangan dari

		berjalan maksimal		Bupati kepada Camat
--	--	-------------------	--	---------------------

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Titehena maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Kecamatan Titehena perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya dapat dikuasai yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya yang relatif kurang dikuasai yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

3.4.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4.1
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan iktis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai. 5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. 6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja; 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan. 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun). 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik. 6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa yang melakukan pelanggaran; 7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah desa dalam memberikan pelayanan; 8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal; 9. Perilaku masyarakat belum mendukung program 10. Semakin lemahnya koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan dan pelayanan publik lainnya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota.

Peluang	Tantangan
1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya. 2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan. 3. Adanya program utama "Gerbang Emas" 4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab 5. Kemajuan teknologi. 6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya). 7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki. 8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah 2. Potensi SDA yang belum tergal. 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar. 4. Masih tingginya keluarga miskin dan pengangguran 5. Berada pada jalur jalan negara dan dekat Ibukota kabupaten sehingga rawan kamtibmas. 6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik; 7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah kecamatan Adonara Timur, yang sebagian wilayah masih terisolasi fisik.

3.4.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Demon Pagong lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada
6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan

peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Titehena

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Visi Kecamatan Titehena dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2012 yaitu “ Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata ”. Berdasarkan pada visi Kabupaten Flores Timur di atas, Visi dan Misi Kecamatan Titehena adalah:

“ TITEHENA MEMBANGUN DALAM PELAYANAN PEMERINTAHAN YANG BERSARI (BERSIH, ELOK, RAMAH SANTUN, RAPIH, INDAH) MENUJU MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi SKPD Kecamatan Titehena sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa secara berkesinambungan dan berkualitas Bersih, Elok, Ramah, Santun, Rapih dan Indah.
2. Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara periodik.
3. Penyelenggaraan administrasi umum melalui pembinaan organisasi dan tata kelola, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha, dan kearsipan secara berkualitas.

Tabel 4.2.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Kantor Camat Titehena

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
Misi 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan pemerintahan desa yang berkualitas.								
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	Keikutsertaan aparat dalam bimtek/diklat di kabupaten	87%	89%	92%	95%	98%
2.	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Adanya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa	85%	87%	90%	92%	95%
Misi 2. Penyelenggaraan administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam yang berkualitas melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan pengkoordinasian serta pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan.								
3.	Meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Meningkatnya derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Adanya koordinasi dengan program - program pemberdayaan	85%	88%	90%	95%	98%
4.	Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	Tersedianya dokumen RPJMDes dan APBDes di desa	80%	88%	90%	95%	98%
Misi 3. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.								
5.	Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tercapainya kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	85%	87%	90%	95%	99%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Titehena dan karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan Titehena, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergal dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
- 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
- 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
- 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
- 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada
- 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Pelayanan Pemerintah yang baik menuju manusia dan masyarakat Wulanggiting yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat.			
Misi 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan pemerintahan desa yang berkualitas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
a. Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan transparansi dan akuntabilitas	1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
b. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi	2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai
		3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur baik di kecamatan maupun di desa	3. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
			4. Penegakan aturan yang berlaku
Misi 2. Penyelenggaraan administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam yang berkualitas melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan pengkoordinasian serta pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan.			
1. Meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	1. Meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	1. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas proses perencanaan di tingkat desa	2. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	2. Meningkatkan pendampingan kepada desa dalam proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di desa	2. Peningkatan koordinasi antar instansi / SKPD
			3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa
			4. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat
Misi 3. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.			
1. Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	1. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai
			2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan Indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Titehena.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan Indikatif dapat dilihat pada tabel lampiran berikut ini :

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dikemukakan pada tabel

Tabel

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	
1	Keikutsertaan aparat dlm Bimtek/Diklat di Kabupaten	50%	65%	70%	70%
2	Adanya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa/kelurahan	25%	40%	50%	45%
3	Adanya sarana dan prasarana kearsipan	60%	70%	75%	75%
4	Adanya koordinasi dengan program-program pemberdayaan	50%	65%	70%	70%
5	Tersedianya dokumen RPJMDes dan APBDes di Desa/Kelurahan	50%	65%	70%	70%
6	Adanya tingkat partisipasi masyarakat	40%	45%	50%	65%

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Kantor Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 yang memuat dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Titehena dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Titehena Tahun 2017 - 2022 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Titehena. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Titehena telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Renstra Kantor Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat bagi kebutuhan perencanaan pembangunan di daerah demi terwujudnya tujuan Masyarakat Yang BERSARI (Bersih, Elok, Ramah, Santun, Rapih, Indah) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lato,
Kecamatan Titehena,

Karnelis Kowa Deket, S.Sos
Pembina
NIP. 19700220 200012 1 004

TABEL 6.1 :
RINCIAN PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF UNIT KANTOR CAMAT TITEHENA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	576,839,000.00	100%	636,722,900.00	100%	700,395,190.00 300.915.000	100%	701,762,710.00	100%	771,938,981.00	100%	3,389,658,781.00	
				1.20.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangkat, Meterai dan Benda Pos Lainnya	160 lembar	176 lembar	1,320,000.00	193 lembar	1,452,000.00	212 lembar	1,597,200.00	234 lembar	1,756,920.00	157 lembar	1,932,612.00	175 lembar	8,058,732.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12,100,000.00	12 Bulan	13,310,000.00	12 Bulan	14,641,000.00	12 Bulan	14,750,900.00	12 Bulan	16,225,880.00	12 Bulan	71,027,680.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penzinaan kendaraan dinas/operasional	STNK dan Pajak Kendaraan Dinas	7 Unit	7 Unit	1,100,000.00	7 Unit	1,210,000.00	7 Unit	1,331,000.00	7 Unit	1,440,800.00	7 Unit	1,584,880.00	4 Unit	6,666,680.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	48 OB	48 OB	24,700,500.00	48 OB	27,170,550.00	48 OB	29,887,605.00	48 OB	29,997,405.00	48 OB	32,997,145.50	48 OB	144,753,205.50	Kantor Camat
				1.20.09.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100 Jenis	200 Jenis	3,850,000.00	200 Jenis	4,235,000.00	200 Jenis	4,658,500.00	200 Jenis	4,768,300.00	200 Jenis	5,245,130.00	200 Jenis	22,756,930.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catridge	200 Jenis	200 Jenis	39,391,000.00	200 Jenis	43,330,100.00	200 Jenis	47,663,110.00	200 Jenis	47,772,910.00	200 Jenis	52,550,201.00	200 Jenis	230,707,321.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Biaya Foto Copy dan Penjiilidan	1 Tahun	1 Tahun	22,115,000.00	1 Tahun	24,326,500.00	1 Tahun	26,759,150.00	1 Tahun	26,868,950.00	1 Tahun	29,555,945.00	1 Tahun	129,525,445.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100 Jenis	100 Jenis	9,900,000.00	100 Jenis	10,890,000.00	100 Jenis	11,979,000.00	100 Jenis	12,088,900.00	100 Jenis	13,297,680.00	100 Jenis	58,155,480.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	12 Bulan	960,000.00	12 Bulan	1,056,000.00	12 Bulan	1,161,600.00	12 Bulan	1,271,400.00	12 Bulan	1,388,540.00	12 Bulan	5,947,540.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Dana untuk Makanan dan Minuman Rapat serta Tamu	1 Tahun	1 Tahun	50,545,000.00	1 Tahun	55,599,500.00	1 Tahun	61,139,450.00	1 Tahun	61,269,250.00	1 Tahun	67,396,175.00	1 Tahun	295,969,375.00	Kantor Camat
				1.20.09.01.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	750 OH	750 OH	336,836,500.00	750 OH	370,520,150.00	750 OH	407,572,165.00	750 OH	407,681,965.00	750 OH	448,450,161.50	750 OH	1,971,060,941.50	Antar Kab/Prop/Pusat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1.20.09.01.12	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya Gaji Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60 OB	60 OB	76,021,000.00	60 OB	83,623,100.00	60 OB	91,985,410.00	60 OB	92,095,210.00	60 OB	101,304,731.00	60 OB	445,029,451.00	Kantor Camat
2	Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	Ketersediaan ruangan perlengkapan gedung dan peralatan kerja dari jumlah aparat		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	196,235,000.00	100%	215,858,500.00	100%	237,444,350.00	100%	238,212,950.00	100%	262,034,245.00	100%	1,149,785,045.00	
				1.20.09.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Operasional Kantor	3 Unit	3 Unit	84,755,000.00	3 Unit	93,230,500.00	3 Unit	102,553,550.00	3 Unit	102,663,350.00	3 Unit	112,929,685.00	3 Unit	496,132,085.00	Kantor Camat
				1.20.09.02.02	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya alat perlengkapan di Rumah Jabatan Camat	1 Tahun	1 Tahun	19,500,000.00	1 Tahun	21,450,000.00	1 Tahun	23,595,000.00	1 Tahun	23,704,800.00	1 Tahun	26,075,280.00	1 Tahun	114,325,080.00	Kantor Camat
				1.20.09.02.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	7,700,000.00	1 Tahun	8,470,000.00	1 Tahun	9,317,000.00	1 Tahun	9,426,800.00	1 Tahun	10,369,480.00	1 Tahun	45,283,280.00	Kantor Camat
				1.20.09.02.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 set	1 set	27,280,000.00	1 set	30,008,000.00	1 set	33,008,800.00	1 set	33,118,600.00	1 set	36,430,460.00	1 set	159,845,860.00	Kantor Camat
				1.20.09.02.05	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Biaya untuk Belanja Bahan Baku Bangunan serta Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	33,000,000.00	1 Tahun	36,300,000.00	1 Tahun	39,930,000.00	1 Tahun	40,039,800.00	1 Tahun	44,043,780.00	1 Tahun	193,313,580.00	Kantor Camat
				1.20.09.02.06	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Dana untuk Service Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang serta Bahan Bakar	1 Tahun	1 Tahun	17,000,000.00	1 Tahun	18,700,000.00	1 Tahun	20,570,000.00	1 Tahun	20,679,800.00	1 Tahun	22,747,780.00	1 Tahun	99,697,580.00	Kantor Camat
				1.20.09.02.07	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	7,000,000.00	1 Tahun	7,700,000.00	1 Tahun	8,470,000.00	1 Tahun	8,579,800.00	1 Tahun	9,437,780.00	1 Tahun	41,187,580.00	Kantor Camat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	39,200,000.00	100%	43,120,000.00	100%	47,432,000.00	100%	47,541,800.00	100%	52,295,980.00	100%	229,589,780.00	
				1.20.09.03.01	Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Mutu sumber daya manusia	10 OH/Tahun	10 OH/Tahun	39,200,000.00	10 OH/Tahun	43,120,000.00	10 OH/Tahun	47,432,000.00	10 OH/Tahun	47,541,800.00	10 OH/Tahun	52,295,980.00	10 OH/Tahun	229,589,780.00	Antar Kab/Prop/Pusat
5	Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Adanya koordinasi dengan program – program pemberdayaan		Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Terselenggaranya PAP Prog. Pemberdayaan PNPMP-MP dan Anggur Merah	100%	100%	38,970,000.00	100%	42,867,000.00	100%	47,153,700.00	100%	47,483,100.00	100%	52,231,410.00	100%	228,705,210.00	
				1.20.09.05.01	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan/PNPM-MP dan Anggur Merah	Tersedianya Dana Pembinaan Administrasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan/PNPM-MP dan Anggur	1 Tahun	1 Tahun	5,850,000.00	1 Tahun	6,435,000.00	1 Tahun	7,078,500.00	1 Tahun	7,188,300.00	1 Tahun	7,907,130.00	1 Tahun	34,458,930.00	Kabupaten, 11 desa di kecamatan
				1.20.09.05.02	Penyelenggaraan Musrenbang	Tersedianya Dana Penyelenggaraan Musrenbang	1 Kali	1 Kali	21,120,000.00	1 Kali	23,232,000.00	1 Kali	25,535,200.00	1 Kali	25,665,000.00	1 Kali	28,231,500.00	1 Kali	123,803,700.00	Kabupaten, 11 desa di kecamatan
				1.20.09.05.03	Facilitasi dan koordinasi dalam kemasyarakatan	Tersedianya Dana Honorarium Kapospol dan Babinsa	24 OB	24 OB	12,000,000.00	24 OB	13,200,000.00	24 OB	14,520,000.00	24 OB	14,629,800.00	24 OB	16,092,780.00	24 OB	70,442,580.00	Kantor Camat